BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan Lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pratiwi & Januarti, 2013).

Terdapat lima jenis opini yang diberikan oleh BPK-RI yaitu : (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas, (3) Opini Wajar Dengan Pengecualian, (4) Opini Tidak Wajar Pendapat, (5) Tidak Memberikan Pendapat. Peringkat opini terbaik adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian. Setiap Pemerintah Daerah tentu akan sangat berupaya mendapatkan opini WTP ini. Jika belum memungkinkan, setidaknya mendapatkan opini WDP, dan sangat menghindari opini TMP maupun opini TW.

Berbagai alasan Pemerintah Daerah menginginkan opini WTP. Pertama, prestise atau kebanggaan telah mendapatkan peringkat opini terbaik/tertinggi, yaitu sebagai Pemerintah Daerah yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material terkait laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kedua, banyak kalangan yang beranggapan bahwa dengan mendapatkan opini WTP berarti pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah dinyatakan bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, namun anggapan demikian tidak sepenuhnya benar. Ketiga, citra baik bagi pimpinan daerah, yang dapat digunakan secara politisi sebagai modal untuk maju kembali sebagai calon kepala daerah dimasa yang akan datang (Zulkarnain & Andriansyah Rezka, 2018).

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, BPK-RI memeriksa 541 dari 542 LKPD di seluruh Indonesia Tahun 2020. BPK-RI memberikan 33 dari 34 (97%) LK Pemerintah Provinsi dengan memperoleh opini WTP, 365 dari 415 (88%) LK Pemerintah Kabupaten memperoleh opini WTP, dan 88 dari 93 (95%) LK Pemerintah Kota memperoleh opini WTP. Dari jumlah tersebut diketahui terdapat 55 LKPD belum memperoleh opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang kota/kabupatennya menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP cukup tinggi. Berikut ini disajikan perolehan opini audit pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2018 -2021, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Daftar Opini Audit BPK-RI pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	Opini Tahun 2018	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021
1	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Tanggamus	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Lampung Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Lampung Timur	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Lampung Tengah	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Lampung Utara	WTP	WDP	WDP	WDP
7	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Pesawaran	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Pringsewu	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Mesuji	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kab. Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Pesisir Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP	WDP	WDP
15	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : *lampung.bpk.go.id*

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak dipertanyakan terkait kewajarannya, seperti Kota Bandar Lampung yang mendapat opini WDP pada

tahun 2021. Menurut Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung Andri Yogatama masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkot Bandar Lampung. Penyebab Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan opini WTP yaitu karena adanya penggunaan restridikes sebesar Rp 49 M, jadi penggunaan dana DAK yang digunakan untuk kegiatan lain. Penyebab lainnya yaitu adanya pencatatan hutang yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, jadi ada lebih saji Rp29 M dan transaksi kurang saji Rp2 M. Selain itu, ada catatan-catatan seperti pada umumnya ialah asset yang tidak tertib (*Suaralampung.id*).

Selain hal diatas yang menyangkut kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, adapun laporan keuangan Provinsi Lampung yang sudah mendapatkan opini WTP pada tahun 2021. Ditemukakan beberapa permasalahan yang secara materil tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan namun tetap membutuhkan perhatian perbaikan kedepannya. Beberapa masalah tersebut yaitu pengelolaan pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan, belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada sekretariat daerah sebesar Rp 7,12 juta dan sekretariat DPRD sebesar Rp 57,11 juta tidak sesuai ketentuan, dan piutang RSUD Abdul Moeloek sebesar Rp 6,18 M belum dipulihkan (*Medialampung*).

Ada beberapa variabel yang dapat mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu : Kemandirian Keuangan Daerah artinya daerah memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Instrumen yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah yaitu dengan memanfaatkan karakteristik keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari *wealth* atau tingkat kemakmuran suatu daerah.

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah artinya semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur

dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Potensi pendapatan daerah sering lebih rendah dan biaya pengumpulan yang tinggi dibandingkan dengan banyaknya pajak Pemerintah Pusat (Bawuna et al., 2016).

Efisiensi Belanja Daerah artinya pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan public yang dikelola oleh Kabupaten/Kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dinyatakan oleh Sasana (2011). Agar mampu secara baik, lancer dan efisien dalam mengelola belanja daerah maka pemerintah daerah perlu mengukur kinerja fiskalnya untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisien dan efektifnya mereka dapat membelanjakan uang publiknya. Pemerintah Daerah harus mampu mengontrol pengeluaran daerah, meningkatkan efisiensi pengeluaran dan menghemat anggaran (Poyoh *et al*, 2017).

Ketergantungan Keuangan artinya ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Perlunya pemerintah daerah untuk mengetahui kesanggupan daerah itu guna peningkatan pendapatan asli daerah, yang nantinya tentu saja tidak tergantung pada penyaluran pemerintah pusat.

Derajat Desentralisasi artinya tolak ukur kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma, 2010).

Ada banyak kondisi yang terus mendorong perlu adanya riset pengukuran setiap kinerja keuangan penyelenggara anggaran yang telah diberikan amanat oleh undang-undang dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja yang dihasilkan, maka peranan dari setiap data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi sumber pembiayaan daerah serta besaran belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah agar perencanaan keuangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Rani (2022) yang berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah Di Pulau Jawa". Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yaitu di Provinsi Lampung dengan LKPD Tahun 2019-2021. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Daerah/Kota Di Lampung"**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan dibatasi dengan hanya membahas terkait "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Provinsi/Daerah/Kota Di Lampung" dimana dengan variabel pengukuran kinerja keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang ada di dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK ?
2. Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK ?
3. Apakah Rasio Efisiensi Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK ?
4. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK ?
5. Apakah Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pemberian Opini BPK.
2. Untuk membuktikan secara empiris Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pemberian Opini BPK.
3. Untuk membuktikan secara empiris Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Pemberian Opini BPK.
4. Untuk membuktikan secara empiris Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pemberian Opini BPK.
5. Untuk membuktikan secara empiris Derajat Desentralisasi terhadap Pemberian Opini BPK.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, maka peneliti mengharapkan adanya manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi dan bahan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintahan DaerahPenelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan kontruktif bagi pemerintahan daerah dalam rangka memberikan kebijakan yang dilakukan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Bagi Penulis

   Dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan derajat desentralisasi. Selain itu, manfaat bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

c. Manfaat Bagi Akademik

   Sebagai bahan keputusan dan literatur mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar, penelitian-penelitian terdahulu dan menjelaskan tentang kerangka pikir serta bangun hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai sumber daya yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN